

# KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) SEBAGAI MODEL PARTISIPASI PUBLIK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DI TINGKAT DESA DI BALI

<sup>1</sup>Putu Nomy Yasintha, <sup>2</sup>Ni Putu Candrika

Universitas Udayana (Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana Denpasar, Bali)  
putu\_nomy@unud.ac.id

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Desa di Bali mampu berperan menjadi suatu model partisipasi masyarakat dalam keterbukaan informasi bagi masyarakat di tingkat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif dimana peneliti mencoba untuk memahami bagaimana peran KIM dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat. Penelitian ini akan dibedah dengan menggunakan teori Cohen dan Uphoff dengan beberapa indikator yaitu: (a) pembuatan keputusan; (b) penerapan keputusan; (c) pemanfaatan hasil; (d) evaluasi kegiatan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa KIM memiliki potensi yang besar sebagai Lembaga bagi Pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat di tingkat Desa. KIM yang merupakan Lembaga swadaya dari desa sendiri memiliki kedekatan yang berbeda dengan masyarakat sehingga gaya penyampaian informasi akan lebih mudah dipahami bagi masyarakat lokal. Hanya saja KIM yang merupakan Lembaga swadaya masih kesulitan dalam melakukan pembinaan kepada pengurusnya dikarenakan keterbatasan dana yang mereka miliki. Selain itu juga belum ada dasar hukum yang kuat bagi KIM sehingga mereka kesulitan memohon penganggaran kepada Pemerintah Lokal.

**Kata Kunci:** Kelompok Informasi, Keterbukaan Informasi, Partisipasi Masyarakat

## Abstract

The purpose of this research is to see how the Community Information Group (KIM) in the Village in Bali is able to play a role as a model of community participation in information disclosure for the community at the village level. This research is a qualitative research with a descriptive qualitative approach where the researcher tries to understand the role of KIM in distributing information to the public. This research will be dissected using Cohen and Uphoff theory with several indicators, namely: (a) decision making; (b) implementation of the decision; (c) utilization of the results; (d) activity evaluation. The results of the study show that KIM has great potential as an institution for the government to approach the community at the village level. KIM which is a non-governmental organization from the village itself has a different affinity with the community so that the style of delivering information will be easier to understand for the local community. It's just that KIM, which is a non-governmental organization, still has difficulty in providing guidance to its management due to the limited funds they have. In addition, there is also no strong legal basis for KIM so that they find it difficult to request a budget from the Local Government.

**Keywords:** Community Information, Information Disclosure, Society participation



ISSN: xxxx-xxxx  
Vol.1, No.1 2021

Diajukan 24 Oktober 2021  
Diterima 26 November 2021  
Diterbitkan 29 Desember 2021

\*Penulis korespondensi  
putu\_nomy@unud.ac.id

**Sitasi**  
Yasintha, P.M., Chandrika,  
N.P. (2021) Kelompok  
Informasi Masyarakat (KIM)  
sebagai Model Partisipasi  
Publik dalam Keterbukaan  
Informasi di Tingkat Desa di  
Bali JIPKA, 1(1), 40-47.

## PENDAHULUAN

Informasi saat ini merupakan kebutuhan utama bagi setiap orang, di samping kebutuhan akan sandang, pangan serta papan. Informasi terjadi atas dasar komunikasi antar individu satu dan individu yang lainnya. Reformasi saat ini menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat akuntabel dan transparan bagi publik. Hak memperoleh informasi merupakan hak yang dimiliki oleh masing-masing warga negara, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi terwujudnya penyelenggaran negara yang baik selain itu dapat mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara atau Badan Publik lainnya, karena segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan diperlukan adanya pengelolaan informasi publik.

Sebagaimana yang terkandung dalam Permen Kominfo No. 17 Tahun 2009 yang menyatakan Permen Kominfo tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan implementasi dari peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan komunikasi. Begitu juga pasal 1 poin (5) yang berbunyi sebagai berikut, kelembagaan komunikasi sosial adalah lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat lingkungannya dan yang berpotensi dalam penyebaran informasi, penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat.

Pasal 5 poin (2) dalam hal penyelenggaraan diseminasi informasi nasional, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi, serta kemitraan dengan mendayagunakan media massa da lembaga komunikasi sosial. Pasal 5 poin (8) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota dapat mendayagunakan kelompok komunikasi sosial sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional. Pasal 9 poin (3) pejabat pelayanan informasi dapat dibantu oleh kelompok informasi masyarakat sebagai pelaksana diseminasi informasi nasional. Pasal 12 poin (2) fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial provinsi, kabupaten atau kota. Kelompok informasi masyarakat disosialisasikan Diskominfo di tahun 2011 yang dilandaskan oleh keputusan kementerian komunikasi dan informatika untuk

pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial yang menjadikan saran komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat langsung. Dengan adanya program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yaitu program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan di kelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. KIM dijalankan dengan maksud mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi.

KIM membantu menciptakan jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya agar bisa saling memberdayakan. Salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi guna menciptakan desa mandiri akan mengakses informasi. Sebagai sebuah kelompok, KIM dapat dibentuk oleh paling sedikit 3 orang. Jumlahnya dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mengatur anggotanya. supaya efektif, jumlahnya tidak lebih dari 30 orang. KIM ini dapat dibentuk dipertanian maupun dipedesaan. Birokrasi di pedesaan perlu diperkuat dengan pembangunan sistem informasi yang baik (Setiawan, 2020).

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perhatian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika karena masih banyak desa di Bali yang membutuhkan komunikasi informasi dikarenakan tidak memiliki sumber daya manusia yang mengerti akan informasi dan komunikasi. Kebanyakan Desa terpencil di Bali masih kurang akan jenjang pendidikan yang tinggi oleh karna itu untuk mengakses sebuah informasi, masyarakat tidak tau untuk mengakses informasi dengan menggunakan internet. Sebagai mana di jelaskan seperti di pedoman kementerian komunikasi dan informasi RI masyarakat harus peka akan arus informasi yang ada dikarenakan informasi adalah salah satu pesan yang bisa membuat kemajuan sebuah lingkungan agar tidak ketinggalan arus informasi dari luar dan mampu menciptakan desa yang mandiri akan mengakses informasi secara sendiri tidak bergantung oleh pemerintah (Alfando, 2013).

## **METODE**

Penelitian yang digunakan untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Sebagai Model Partisipasi Publik Dalam Keterbukaan Informasi Tingkat Desa di Bali adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian kualitatif analisis penelitiannya berusaha untuk mengungkap dan memberikan gambaran terhadap suatu fenomena yang terjadi. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan deskripsi maupun gambaran dalam mengetahui bagaimana sebenarnya upaya Pemerintah dan masyarakat di Bali khususnya dalam mengatasi keterbukaan akan informasi dan juga agar mengetahui bagaimana gambaran kondisi masyarakat desa di Bali dalam menerapkan informasi yang diterima saat ini.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian literatur pada berbagai artikel dari berbagai jurnal, dan dokumen-dokumen yang membahas mengenai Kelompok Informasi Masyarakat di Desa di Bali. Penelitian ini mengumpulkan data berupa kata, kalimat, atau gambar dan bukan menekankan pada angka-angka. Analisa data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian KIM**

Berdasarkan Permen Kominfo Nomor Delapan Tahun 2010 dikatakan bahwa kelompok informasi masyarakat merupakan kelompok yang dibentuk secara swadaya dari dan untuk masyarakat yang bertugas untuk mengelola informasi dan juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu Direktorat kelembagaan dan komunikasi sosial menyatakan bahwa kelompok informasi masyarakat adalah Lembaga layanan public yang dibentuk dan dikelola dari oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi kepada layanan informasi dan bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat tersebut. Mengacu pada dua pengertian tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya keberadaan kelompok informasi masyarakat merupakan wadah bagi masyarakat terutama di desa

untuk memperoleh layanan informasi dan juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang harapannya dapat membantu perkembangan desa menjadi lebih baik.

Kelompok Informasi masyarakat pada dasarnya memiliki beberapa aktivitas pokok yang sering disingkat dengan nama Adinda. Aktivitas pokok yang pertama itu memberikan akses informasi di mana Kim melakukan aktivitas dengan mengakses informasi dari berbagai sumber baik sumber langsung maupun sumber tidak langsung. Informasi yang diperoleh oleh KIM harus di diskusikan terlebih dahulu Bersama dengan Tim sebelum pada akhirnya diteruskan kepada masyarakat, Kim harus memutuskan informasi mana yang sebenarnya sesuai untuk disampaikan kepada masyarakat. Aktivitas lain nya adalah membangun networking atau jejaring.

Kim memiliki tugas untuk membangun jaringan kelembagaan dengan institusi yang berguna sebenarnya bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya. Segala informasi dan pengetahuan yang diperoleh Kim harus di Desiminasi kan yaitu sebuah proses di mana Kim menyebarluaskan informasi setelah informasi itu di olah secara Seksama dan diperiksa kebenarannya. Kim juga memiliki tugas sebagai wadah aspirasi di mana Kim harus mampu untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik kepada pemerintah maupun kepada stakeholder terkait.

### **KIM dan Partisipasi Masyarakat**

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) keberadaannya mencerminkan partisipasi masyarakat terutama terhadap pembangunan di tingkat desa. Jika dilihat berdasarkan teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (1997) dalam (Kalesaran et al, 2015) didapatkan bahwa partisipasi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

#### **1. Pembuatan Keputusan**

Sebelum KIM menyalurkan informasi kepada masyarakat yang merupakan tugas pokok mereka maka akan dilakukan diskusi terlebih dahulu secara internal untuk memutuskan informasi dan jenis pengetahuan apa yang akan mereka sampaikan kepada masyarakat.

#### **2. Penerapan Keputusan**

Selain itu dari sisi penerapan keputusan seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kim akan didasarkan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara swadaya oleh masyarakat. KIM merupakan

Lembaga yang mandiri yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat sehingga seluruh sumberdaya baik secara SDM bersumber dari masyarakat itu sendiri.

### 3. Pengambilan Manfaat

Selanjutnya dari Sisi pengambilan manfaat seluruh kegiatan yang dilaksanakan atau di implementasikan oleh KIM disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat sekitar. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program atau kegiatan yang di implementasikan oleh Kim.

### 4. Evaluasi

Selanjutnya partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. KIM memiliki kewajiban untuk selalu melakukan pelaporan yang pada akhirnya disampaikan atau dipertanggungjawabkan dalam forum desa.

## **KIM, Keterbukaan Informasi dan Pembangunan Desa**

Jika kelompok informasi masyarakat dikaitkan dengan keterbukaan informasi maka kita dapat lihat bahwa sebenarnya keberadaan KIM yang berada di level desa sangat membantu masyarakat desa untuk dapat memperoleh informasi dengan benar. Mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka dikatakan pada pasal 2 ayat 3 bahwa setiap informasi public harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat, waktu singkat, biaya ringan dan cara sederhana dan perlu dipahami bersama bahwa informasi public merupakan hak bagi setiap masyarakat (Afnan, 2018). Dengan adanya KIM ini dapat membantu penyaluran informasi dari pemerintah kepada masyarakat dan meminimalisir kesalahpahaman karena setiap informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat akan didiskusikan secara internal dan secara seksama oleh KIM.

Elemen masyarakat di desa terdiri dari beberapa jenis kelompok yang berbeda sehingga pendekatan komunikasi yang dilakukan harus dapat dengan mudah dipahami oleh KIM informasi disebarluaskan kepada masyarakat desa yang meliputi tokoh adat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok

perempuan, dan kelompok masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. Sistem Informasi selalu menjadi permasalahan yang lumrah terjadi di tingkat desa (Windyaningrum, 2016). Tentu saja dalam menghadapi kelompok masyarakat yang berbeda pendekatan yang dilakukan oleh KIM juga harus berbeda dan tidak ada Lembaga yang lebih baik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat di desa tersebut selain memang Lembaga yang yang dibentuk dan terdiri dari anggota masyarakat desa tersebut dalam hal ini adalah kelompok informasi masyarakat atau KIM. KIM tidak hanya sebuah Lembaga yang membantu dalam menyalurkan informasi dari pemerintah ada masyarakat, tetapi KIM juga mampu untuk membantu masyarakat desa untuk lebih berpartisipasi dan terlibat dalam segala kegiatan yang membangun desa. KIM bisa menjadi penggerak untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat desa dalam berbagai hal karena KIM selain sebagai Lembaga informasi namun juga sebagai Lembaga pemberdayaan di level desa.

Kim bisa membantu masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam mencari tahu kebutuhan desa untuk meningkatkan pembangunan di desa, untuk lebih aktif dalam mengikuti forum pembangunan di desa. Selain itu KIM juga dapat membantu masyarakat untuk turut serta dalam memantau seluruh kegiatan layanan publik yang melaporkan jika terdapat kekurangan dalam layanan publik. Fungsi KIM yang lainnya yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan turut meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa apakah pembangunan desa sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Dan jika masyarakat menemukan terjadi penyimpangan maka masyarakat bisa melaporkan kepada Lembaga Ombudsman, tentu saja masyarakat harus diberikan Edukasi mengenai hal ini yang dapat dilakukan oleh KIM.

Keberadaan KIM di desa tidak hanya serta merta sebagai Lembaga penyalur informasi dari pemerintah kepada masyarakat tetapi juga bagaimana KIM memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat untuk memahami segala informasi publik. KIM memiliki potensi untuk mampu antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi, masyarakat dibantu untuk memahami bahwa setiap informasi dapat membantu pembangunan di desa yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi mereka. Selain itu jejaring yang dimiliki oleh KIM juga dapat membantu masyarakat desa untuk mendapatkan akses lebih dan mampu untuk mendayagunakan informasi

yang mereka peroleh. Saat masyarakat memperoleh informasi KIM juga saya mampu untuk mengedukasi masyarakat agar mereka memiliki Pemahaman akan informasi yang telah mereka peroleh. Dan pada akhirnya KIM juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan potensi masyarakat sebagai pengawas informasi yang ada di Desa.

### **Simpulan**

KIM merupakan lembaga swadaya yang dimiliki oleh desa, sehingga apapun usaha yang dilakukan oleh KIM akan membantu mendukung tidak hanya pada proses penyaluran informasi tetapi juga mampu untuk mendukung pembangunan desa dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Keberadaan KIM sangat strategis tentu saja harus didukung secara penuh oleh pemerintah desa. Dukungan berupa alokasi sarana dan prasarana dan juga sumber daya akan sangat membantu kinerja KIM di Desa. KIM juga merupakan wadah yang sangat sesuai untuk mengedukasi masyarakat desa akan pentingnya informasi. Dan segala informasi yang mereka peroleh dapat bermanfaat tidak hanya bagi diri mereka tapi juga bagi pembangunan desa menuju desa yang mandiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afnan, D. (2019). Fungsi Humas Desa Sebagai Pengelola Informasi di Era Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Soshum Insentif*, 153-163.
- Alfando W.S, Johantan. 2013. Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Sidomulyo Kec. Anggana Kutai Kartanegara. Diunduh dari: [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JOHANTAN%20ALFANDO%20WS%20JURNAL%20\(05-16-13-02-52-11\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/05/JOHANTAN%20ALFANDO%20WS%20JURNAL%20(05-16-13-02-52-11).pdf)
- Kalesaran, Ferdinand dkk. 2015. Partisipasi Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado. Diunduh dari: [https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/10222/9809#:~:text=Cohen%20dan%20Uphoff%20\(1977\)%20menyatakan,fisik%20maupun%20pembangunan%20non%20fisik](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/download/10222/9809#:~:text=Cohen%20dan%20Uphoff%20(1977)%20menyatakan,fisik%20maupun%20pembangunan%20non%20fisik).
- Setiawan, T., & Padmaningrum, D. (2020). Toward The Design Of Village Information Systems As A Villager Communication Medium. *International Journal Of Multi Science*, 1(04), 1-6.
- Windyaningrum, R., & Rubiyasih, A. (2016). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. *Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.